

MEMILIH PIMPINAN NU: REFLEKSI PENGALAMAN DARI MUKTAMAR KE MUKTAMAR



Nur Khalik Ridwan
Alumni Pondok Pesantren Darunnajah
Tanjungsari, Sragen, Banyuwangi.
Sekarang tinggal di Jogjakarta

“Chith (Abdul Muchith Muzadi) dulu itu orang masuk NU, niat ndandakno awak (mereparasikan diri)”. Dengan masuk NU diharapkan dapat sering bertemu dengan orang baik, karena itu kita patut berharap agar saat masuk NU menjadi lebih baik dari sebelumnya.....”¹

(Kiai Munasir Ali)

Model-model pemilihan kepemimpinan PBNU menarik untuk dilihat. Sebab, pemilihan kepemimpinan akan menentukan siapa yang akan terpilih, dan kemungkinan faksi dan klik tertentu dalam NU untuk bisa memenangkan pemilihan. Di dalam sejarah pemilihan kepemimpinan NU, dalam fase-fase tertentu ternyata berbeda-beda, meskipun cenderung pemilihan langsung yang berjalan selama ini telah diterima selama beberapa fase yang lebih panjang.

Perbedaan pola pemilihan dalam kepemimpinan NU, pada dasarnya mencerminkan bagaimana organisasi ini mencoba mengatasi dialektika sosial yang terjadi dalam tubuhnya, berhadapan dengan kenyataan sosial beserta kepentingan faksi-faksi yang bertarung di dalamnya. Dalam hal ini, pola pemilihan kepemimpinan NU, digunakan sebagai bentuk diagnosa tertentu dalam mengatasi problem kepemimpinan yang terjadi dalam fase tertentu.

Pola pemilihan kepemimpinan NU yang berbeda-beda sebagai sebuah diagnosa tertentu, menurut penulis tidak

¹Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, Refleksi 65 Tahun Ikut NU* (Surabaya: Khalista, 2006).

bisa dilepaskan dari gerusan problem laten kepemimpinan NU. Misalnya, terlalu lamanya seorang pemimpin terus menerus dipilih tanpa ada pembatasan, dengan alasan diminta untuk memimpin lagi oleh muktamirin, dan kadang atau sering terjadi dualisme kepemimpinan antara dua badan yang semestinya tidak terjadi, terutama akhir-akhir ini, antara jajaran syuriah dan tanfidziyah.

Tulisan ini ingin mengajak pembaca melihat perbedaan yang terjadi dalam pemilihan kepemimpinan NU di fase-fase pentingnya, dan karenanya tidak membahas seluruh detil dalam setiap muktamar. Fase-fase penting ini dipilih di sini, karena pola pemilihan kemimpinan NU di fase-fase penting itu, ternyata dilakukan dengan cara berbeda-beda dan menyebabkan pembelahan organisasi.

Pertama-tama akan dilihat model badan kepemimpinan di tubuh NU, institusi yang akan dibicarakan sebagai badan yang dikomando oleh tokoh tertentu yang akan dipilih dalam pemilihan. Kemudian, melihat pengalaman pemilihan kepemimpinan NU di masa awal, sedikit narasi umum ketika NU menjadi partai politik, dan fase yang sangat menentukan pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo, kemudian Muktamar ke-28 di Krapyak-Jogjakarta, Muktamar ke-29 di Cipasung-Tasikmalaya, dan kemudian masuk Muktamar ke-31 di Solo.

Dari narasi model-model pemilihan kepemimpinan NU ini, penting menjadi refleksi atas pola pemilihan kepemimpinan

NU di muktamar-muktamar selanjutnya agar diperoleh sebuah kepemimpinan yang masalah, yang menurut Kiai Munasir Ali, sebagaimana dikutip di atas, orang masuk NU biar sering bertemu dengan orang baik, bukan sebaliknya.

Dari Dua Menjadi Tiga Badan Kepemimpinan dalam PBNU

Melihat kepengurusan awal tahun 1926, kepemimpinan dalam NU ada dua badan, yaitu badan syuriah dan tanfidziyah, di mana mustasyar digabung dalam syuriah atau bagian dari syuriah. Badan syuriah terdiri dari Rais Akbar (dijabat KH. Hasyim Asy'ari), katib awal, katib tsani, a'wan, dan mustasyar. Badan syuriah ini badan tertinggi yang mengendalikan organisasi. Sedangkan badan tanfidziyah adalah pelaksana yang harus tunduk pada badan syuriah, yang terdiri dari ketua, penulis, bendahara, dan pembantu. Saat itu, ketua badan tanfidziyah dijabat oleh Hasan Gipo.²

Terjadi perubahan meski tidak mendasar, ketika NU menjadi partai politik yang resminya tahun 1952, meskipun keputusannya sudah beberapa tahun dilakukan sebelumnya. Pada tahun 1952-1954 model kepemimpinan partai NU adalah: Dewan Presidium PBNU (ketuanya KH. Masjkur), syuriah (Rais Aam KH. Wahab Chasbullah), dan tanfidziyah (ketua umum KH. Masjkur). Sedangkan tahun 1954-1956 struktur NU adalah: Dewan Harian PBNU (ketua Rais Akbar KH. Wahab Chasbullah), PB syu-

² Dua badan kepemimpinan NU tahun 1926 ini merujuk H. Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangannya Tersiar*, (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Almarhum KHA. Wahid Hasjim, 1957), hlm. 472.

riyah (Rais Akbar KH. Wahab Chasbullah), dan PB tanfidziyah (ketua umum KH. Idham Kholid) tanpa ada mustasyar. Pada periode 1956-1959 model ini berubah lagi menjadi sekadar syuriyah dan tanfidziyah tanpa ada mustasyar.³

Muktamar NU ke-27 di Situbondo menunjukkan struktur PBNU berubah, yaitu dibentuknya badan mustasyar sebagai institusi sendiri yang berfungsi memberi nasehat dan saran; syuriyah sebagai pemimpin tertinggi, dan tanfidziyah sebagai pelaksana harian. Di Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Krapyak ada suara-suara agar institusi mustasyar dihapus dan disatukan saja dengan syuriyah,⁴ tetapi suara-suara itu tidak berhasil atau tidak memperoleh suara di dalam muktamar. Institusi mustasyar terus bertahan hingga kini.

Menurut teori dan aturan di NU, mustasyar bertugas menyelenggarakan pertemuan setiap kali dianggap perlu, untuk secara kolektif memberikan nasehat kepada pengurus NU menurut tingkatannya dalam rangka menjaga kemurnian Khittah Nahdliyah dan *ishlahu dzati al-bain* (arbitrase).⁵

Institusi syuriyah adalah pemimpin tertinggi yang berfungsi sebagai pembina,

pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan Nahdlatul Ulama yang tugasnya; menentukan arah kebijakan NU dalam melaksanakan usaha dan tindakannya untuk mencapai tujuan NU; mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat yang ada di NU; apabila suatu keputusan suatu perangkat NU dinilai tidak baik untuk NU, pengurus syuriyah atas keputusan rapatnya dapat membatalkan keputusan atau langkah perangkat tersebut; dan tugas-tugas lainnya.

Badan tanfidziyah berfungsi sebagai pelaksana tugas harian yang berkewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus syuriyah, termasuk melaporkan secara periodik kepada pengurus syuriyah tentang pelaksanaan tugasnya. Dengan sendirinya, tanfidziyah bukan pemimpin tertinggi di dalam NU, dan bisa dikoreksi dengan keras oleh syuriyah bila dianggap perlu dikritik dengan keras. Bahwa pemimpin tanfidziyah tidak bisa dipecat oleh syuriyah adalah soal aturan yang ada di dalam AD/ART NU yang menempatkan ketua umum dipilih oleh muktamar.

³ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003), bagian "Lampiran". Dalam lampiran yang dikutip Greg Fealy ini, pengurus PBNU 1954-56 KH. Wahab Chasbullah masih disebut sebagai Rais Akbar, sedangkan pada pengurus PBNU 1952-1956 KH. Wahab Chasbullah disebut sebagai Rais Aam.

⁴ *Yogya Post*, November 1989, dalam judul berita "Mulai Digoyang Peran Ulama".

⁵ Tugas dan wewenang masing-masing badan ini, merujuk pada ART NU Hasil Muktamar ke-28 tahun 1989, Bab V tentang "Tugas dan Wewenang", pasal 29, 30, dan 31. Tugas dan wewenang badan-badan pimpinan NU ini, di muktamar-muktamar selanjutnya juga tidak berubah, kecuali beberapa redaksi tertentu, misalnya dalam ART NU Hasil Muktamar ke-31 tahun 2004, pasal 49, 50 dan 51 juga sama disebutkan demikian.



Beberapa Pengalaman: Pola-Pola Pemilihan Kepemimpinan dalam NU

1. Musyawarah Memilih Rais Akbar KH. Hasyim Asy'ari dan Hasan Gipo

Waktu itu, sebuah rapat yang diadakan di Surabaya dihadiri oleh ulama-ulama besar, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng, Kiai Bisri Syansuri Denanyar, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Nawawi Pasuruan, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Hambali Kudus, Kiai Nachrawi Malang, Kiai Doro Muntaha Madura (menantu Kiai Cholil Bangkalan), dan lain-lain.

Rapat itu memutuskan dua hal. *Pertama*, mengirim utusan ulama pesantren di Indonesia ke kongres Dunia Islam di Mekkah, dengan tugas memperjuangkan hukum-hukum madzhab empat. *Kedua*, mendirikan organisasi yang atas usul KH. Alwi Abdul Aziz diberi nama *Jam'iyah Nahdlatul Ulama*.⁶

⁶ Rapat itu diadakan pada 16 Rajab 1344 H bersamaan dengan tahun 1926. Lihat, H. Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim*, hlm. 471-472.

⁷ H. Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim*.

⁸ Saifullah Ma'shum (editor), *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 49-54, dalam judul tulisan "Hasan Gipo (1869-1934): Ketua Tanfidziyah NU pertama".

Dalam rapat itu juga dibentuk pengurus yang terdiri dari dua badan, syuriyah dan tanfidziyah. Dalam rapat itu juga, Kiai Hasyim Asy'ari diangkat sebagai Rais Akbar dengan wakil Kiai Dahlan dari Surabaya, dan Hasan Gipo sebagai ketua tanfidziyah. Rapat itu juga menentukan seluruh kelengkapan dua badan, syuriyah dan tanfidziyah.⁷ Rapat pemilihan ini dilakukan sebelum dilakukan Muktamar NU ke-1 yang diadakan tanggal 12 Oktober 1926.

Hasan Gipo sebagai ketua badan tanfiziyah juga diangkat dalam rapat di Surabaya ketika mendirikan NU itu. Pemilihan pengurus NU periode awal, menurut *Majalah Oetoesan NO* yang terbit tahun 1930-an dilakukan melalui musyawarah kecil yang melibatkan beberapa tokoh yang datang di sekitar daerah Ampel, Kawatan, Bubutan, dan daerah sekitarnya. Dalam forum sederhana itu, Hasan Gipo dipilih sebagai ketua tanfidziyah selama tiga tahun.⁸

2. Muktamar Memilih Secara Langsung

Pada Muktamar ke-3 tahun 1928, muktamar memutuskan pemilihan pengurus dengan suara terbanyak. Pada kongres ke-3 (muktamar NU ke-3), Hasan Gipo digantikan Kiai Noor dari Sawah Pulo. Pemilihan Kiai Noor lewat kongres (muktamar ke-3) pesertanya diikuti kalangan yang lebih luas dari luar daerah Surabaya.

Dalam Muktamar NU ke-12 di Malang tahun 1937, Kiai Noor digantikan oleh Kiai Mahfudz Sidiq, yang dikenal sebagai tokoh muda energik. Pada Muktamar ke-8 tahun

1932, KH. Hasyim Asy'ari juga menyerahkan waktu muktamar kepada muktamirin, yang sebelumnya selalu diadakan pada bulan Rabi'u ats-Tani.⁹

Kiai Hasyim Asy'ari sendiri wafat tanggal 25 Juli 1947, padahal Mei 1947 beliau masih diangkat sebagai Rais Akbar NU. Untuk sementara waktu figur Kiai Wahab Chasbullah memegang pimpinan syuriah NU sampai ditetapkan kembali tahun 1950 oleh muktamar. Pada Mei 1950 dalam Muktamar ke-18, Kiai Wahab Chasbullah ditetapkan sebagai pemimpin NU. Pada saat itulah, istilah Rais Akbar diganti menjadi Rais Aam, dan NU selanjutnya memutuskan keluar dari Masyumi meski keputusannya ditangguhkan dan baru dilaksanakan pada Muktamar ke-19 pada April 1951.

Terjadinya proses peralihan dari pemilihan musyawarah rapat yang menentukan kepemimpinan PBNU sebagaimana ditunjukkan pada pemilihan kepemimpinan NU tahun 1926, disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga setelah NU menjadi partai politik. Pada pasal VI tentang Muktamar salah satunya disebutkan tentang pemilihan pemimpin NU oleh muktamar (muktamirin), yaitu muktamar membicarakan: masalah-masalah hukum, haluan, dan garis besar perjuangan NU, pemilihan pengurus besar

NU (syuriah dan tanfidziah) apabila sudah sampai waktunya, dan soal-soal yang bertalian dengan peripenghidupan umat.¹⁰ Di sini sangat jelas, pemilihan dilakukan dengan jalan langsung lewat muktamar.

Pemilihan langsung terhadap pemimpin badan syuriah dan tanfidziah NU ini tampaknya terus terjadi sampai rentangan fase yang panjang. Greg Fealy juga mencatat misalnya ketika Wahid Hasjim meninggal dalam kecelakaan bulan April 1952, KH. Mochammad Dahlan mengambil alih kedudukan sebagai wakil ketua, dan pada Muktamar NU tahun 1954, KH. Mochammad Dahlan ini dipilih oleh muktamirin sebagai ketua tanfidziah,¹¹ yang ini juga menunjukkan adanya pemilihan secara langsung oleh muktamirin.

KH. Idham Cholid yang mulai terpilih sejak tahun 1956 juga dipilih secara langsung oleh muktamirin. Pengakuan ini diberikan oleh KH. Idham Cholid sendiri, ketika dia membuat kronologi biografi singkatnya, yang menyebutkan bahwa: tahun 1956, terpilih sebagai ketua umum PBNU di dalam kongres; tahun 1959, terpilih sebagai Ketua Umum PBNU di dalam kongres; dan 1962, terpilih sebagai ketua umum PBNU dalam kongres di Solo,¹² yang ini menunjukkan dipilihnya kepemimpinan NU lewat suara muktamirin telah menjadi tradisi yang panjang. Pemilihan secara langsung ini berubah dalam muktamar yang diadakan

⁹ Adien Jauharudin, *Menggerakkan Nahdlatul Tujjar* (Jakarta: PMPI, 2008), hlm. 172 dalam bagian lampiran yang membicarakan *Kronologi Peristiwa dari Muktamar ke Muktamar*,

¹⁰ Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga setelah Jadi Partai Politik, pasal VI tentang "Muktamirin", ayat 4, sebagaimana dilampirkan oleh H. Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim*, hlm. 510.

¹¹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, hlm. 153.

¹² KH. Idham Cholid, *Riwayat Hidup Ringkas Dr. KH. Idham Cholid Ketua PBNU Menko Wk Ketua MPRS*, dalam Dr. KH. Idham Cholid, *Mendajung dalam Taufan* (Djakarta: Endang-API Islam, 1966), hlm. 133-135.

di Situbondo ke-27 tahun 1984.

3. Pemilihan Lewat Ahlul Halli wal Aqdi

Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, yang sebelumnya dimulai dengan Munas Alim Ulama yang juga diadakan di Situbondo tanggal 18-21 Desember 1983 untuk mendiskusikan pentingnya kembali ke khittah NU, pola pemilihan NU berbeda dari sebelumnya. Pada muktamar kali ini, badan pengurus PBNU juga ditambah satu lembaga, yaitu mustasyar, dan pemilihan pemimpin NU dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi*.¹³ Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo ini menghasilkan duet kepemimpinan KH. Achmad Shidiq dan Gus Dur.

Di sini penulis akan menuturkan beberapa narasi tentang pemilihan pemimpin NU pada muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, dengan mengutip Mitsuo Nakamura dan Greg Barton:

Mitsuo Nakamura yang ikut menyaksikan pemilihan di Muktamar NU ke-27, menarasikan demikian:

“Pemilihan pengurus baru sendiri sangat signifikan. Cara-cara yang dipakai ini tidak seperti biasanya, tetapi sangat efektif. Berdasarkan usulan tertulis Idham Cholid, Muktamar memutuskan pemilihan secara aklamasi, sementara untuk pemilihan formatur secara komplis diserahkan kepada KH. As’ad

Syamsul Arifin. KH. As’ad kemudian memilih 6 orang lagi membentuk komisi ahlul halli wal aqdi. Anggota komisi ini berembuk menentukan gambaran calon pemimpin NU di masa datang. Seperti dugaan, KH. Achmad Sidiq dan Gus Dur terpilih sebagai ketua umum syuriah dan tanfidziyah... Persoalan berikutnya, adalah pemilihan ulama senior sebagai mustasyar yang kekuasaan mereka terbatas untuk menjaga demokrasi internal organisasi.”¹⁴

Greg Barton dalam *Biografi Gus Dur*, mengemukakan narasi yang agak berbeda meski substansinya sama, demikian:

“Ketika muktamar dimulai, KH. As’ad Syamsul Arifin yang pesantrennya digunakan sebagai tempat muktamar, mengatakan bahwa ia akan membentuk suatu komisi yang terdiri dari dirinya sendiri dan enam orang yang akan memutuskan komposisi kepemimpinan kelompok yang baru. Dengan menyarankan hal ini, ia mengingatkan kembali akan contoh sejarah dalam pemilihan khalifah Islam yang ketiga, 12 abad sebelumnya, suatu citra yang cocok bagi ulama NU yang muak dengan kepemimpinan teknokrat. Gus Dur setuju karena dipikirmya ini hanya formalitas saja, setelah ditunggu setengah jam, mereka muncul di hadapan peserta muktamar. Kiai As’ad meminta seseorang membacakan nama-nama anggota pengurus besar NU yang baru. Susunan ini sama sekali berbeda dari nama-nama yang ada di daftar yang ditandatangani Gus Dur ...”¹⁵

¹³ Di dalam Islam, tradisi pemilihan oleh *ahlul halli wal aqdi* dilakukan di antaranya oleh sahabat Umar yang memilih beberapa sahabat untuk menjadi formatur pemilihan khalifah, yang kemudian formatur itu memilih sahabat Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah.

¹⁴ Greg Fealy dan Greg Barton (editor), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 85-86, dalam artikel Mitsuo Nakamura berjudul *Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 80-an: Dari Muktamar Semarang 1979 hingga Muktamar Situbondo 1984*.

Penuturan Greg Barton dan Mitsuo Nakamura menunjukkan dengan jelas bagaimana perubahan yang terjadi dalam pemilihan pemimpin PBNU pada tahun 1984 ini, yang sebelumnya memakai pemilihan langsung, diubah dengan pemilihan lewat *ahlul halli wal aqdi*. Kemudian muktamirin beraklamasi.

4. Kembali pada Pemilihan Langsung

Muktamar NU ke-28 tahun 1989 berlangsung di Yogyakarta di Pesantren Krapyak yang letaknya di pinggiran kota Yogyakarta asuhan K.H. Ali Ma'shum. Pada muktamar kali ini, duet kepemimpinan tetap dipercayakan kepada KH. Achmad Shidiq (Rais Aam Syuriah) dan Gus Dur (ketua umum tanfidziah). Muktamirin dalam muktamar ini memilih Rais Aam, Wakil Rais, dan Ketua Umum Tanfidziah.

Pemilihan pengurus dilakukan sesuai dengan tata tertib bab VI tentang "Pemilihan Pengurus Besar" pada pasal 30 disebutkan bahwa pemilihan PB dilakukan oleh wilayah dan cabang NU, dan masing-masing wilayah dan cabang mempunyai hak 1 suara; pemilihan pengurus lewat dua tahanan, tahap pencalonan dan pemilihan; calon dinyatakan syah apabila sekurang-kurangnya 40 suara; pada dasarnya setiap warga NU dapat dicalonkan, dan dianggap menerima pencalonan itu, kecuali mengajukan ketidaksediaan secara tertulis; Rais Aam dan Wakil Rais Aam dipilih secara langsung; ketua dipilih secara

langsung dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk dipilih mendapat persetujuan dari Rais Aam dan Wakil Rais Aam; dan mereka yang terpilih pada ayat (e dan f), dibantu empat orang farmatur yang bertugas menyusun kepengurusan PB.¹⁵

Pemilihan langsung ini, saat itu diberitakan banyak media massa sebagai keputusan penting, karena sebelumnya kepemimpinan NU dipilih oleh *ahlul halli waal aqdi* lewat Muktamar NU ke-27 di Situbondo. Sidang pleno 1 yang dipimpin KH. Sahal Mahfud, Wakil Rais Syuriah PBNU dan H. Anwar Nuris (sekjen PBNU) di Muktamar Krapyak, yang membicarakan tata tertib itu berjalan agak alot. Paling tidak ada 7 jubir PWNU dan PCNU yang menanggapi.

Utusan NU cabang Situbondo, basis di mana KH. As'ad tinggal, menyampaikan bahwa pemilihan Rais dan wakil Rais Aam, sebaiknya dipilih dalam ruangan khusus musyawarah syuriah. Ada juga jubir yang mengatakan bahwa sebaiknya pemilihan langsung hanya dilakukan terhadap Rais Aam, sedang wakil Rais Aam dipilih formatur. Menanggapi banyaknya sorotan terhadap pasal 30 ayat f, KH. Sahal Mahfud mempersilahkan Gus Dur, ketua umum PBNU saat itu untuk memberikan penjelasan.

Gus Dur saat itu memberikan penjelasan:

"Bila pemilihan Rais Aam dilaksanakan

¹⁵ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 160-161.

¹⁶ Keputusan Muktamar NU No. 01/MNU-28/1989 tentang Pengesahan Tata Tertib Muktamar, bab VI tentang "Pemilihan Pengurus Besar", pasal 30.



dalam musyawarah khusus syuriah, pemilihan tanfidziyah juga akan dilaksanakan secara terpisah. Pemilihan semacam ini tentu akan menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam tubuh NU.”¹⁷

Dalam pemilihan, akhirnya muncul beberapa kandidat yang dijagokan dan disebut-sebut, yaitu Kiai Yusuf Hasyim dan Fahmi Saifudin, di samping Kiai Idham Cholid yang sempat disebut-sebut mantan pendukungnya.¹⁸ Keputusan akhir, duet KH. Achmad Shidiq terpilih sebagai Rais Aam Syuriah dan Gus Dur sebagai ketua umum tanfidziyah terpilih kembali. Wakil Rais Aam dipercayakan kepada KH. Ali Yafie.

5. Pemilihan Lewat Muktamirin Melahirkan Kubu PBNU dan KPPNU

Fase pemilihan langsung diteruskan pada Mukhtar tahun 1994. Fase ini dianggap penting karena model pemilihan di muktamar ini berakhir dengan munculnya dua kepemimpinan NU, yaitu PBNU dan KPPNU (Koordinasi Pengurus Pusat NU).

Muktamar ke-29 dimulai tanggal 1-5 Desember 1994, dihadiri sekitar 3500 delegasi, tamu dan peneliti, serta ribuan lain yang datang secara tidak resmi. Ada lebih 1500 tentara di arena muktamar, dan banyak lain berperan sebagai intel. Saat itu, KH. Achmad Shidiq meninggal

¹⁷ Jawa Pos, November 1989, dalam judul laporan “NU itu Relnya Jelas, Bukan seperti Taksi: Keputusan Penting “Pengurus dipilih Langsung”.

¹⁸ Jawa Pos, November 1989, dalam judul laporan “Yusuf Hasyim Mulai Buat Pemanasan”.

dunia sebelum kepengurusannya habis, dan kemudian lewat Munas Alim Ulama di Lampung, Ajengan Ilyas Ruchiyat diangkat sebagai PJs Rais Aam Syuriah PBNU.¹⁹

Muktamar ke-29 tahun 1994 ini dilakukan di Cipasung. Dalam pemilihan kepemimpinan PBNU, tetap seperti muktamar di Krapyak. Sebagaimana dinyatakan dalam ART NU yang disetujui dalam Muktamar ini disebutkan di antaranya:

*“Rais Aam, Wakil Rais Aam, dan ketua umum PBNU dipilih oleh muktamar; Rais Am dan wakil Rais Am dipilih secara langsung; ketua umum dipilih secara langsung dengan terlebih dulu calon yang diajukan menjadi ketua umum mendapat persetujuan dari Rais Aam dan Wakil Rais Aam.”*²⁰

Dengan sendirinya ada 3 jabatan yang dipilih, yaitu Rais Aam Syuriah, Wakil Rais Aam, dan Ketua Umum, yang ini sama dengan muktamar di Krapyak. Pelaksanaan pemilihan dimulai dengan perselisihan mengenai jumlah pemilih yang syah. Menurut panitia muktamar, seharusnya ada 280 delegasi, tetapi ada tambahan 36 delegasi yang mengaku mendapat hak memilih, tetapi hak itu

dicabut karena masalah administrasi.²¹

Kartu pemilihan untuk masing-masing jabatan dibagi menjadi dua, tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Hanya empat puluh kartu suara atau lebih yang bisa ikut kembali dalam tahap pemilihan lanjutan. Rais Aam dan Wakil Rais Aam memiliki hak veto. Pada tahap I pemilihan, Ajengan Ilyas Ruchiyat mendapatkan 205 suara dan Kiai Sahal mendapatkan 101 suara. Kiai Sahal menarik diri dan kemudian bersedia menjadi Wakil Rais Aam.

Dalam babak pemilihan ketua umum tanfidziyah, Gus Dur memperoleh 157 suara, Abu Hasan 136 suara, Fahmi Saifudin 17 suara, dan Cholid Mawardi 6 suara. Pada tahap selanjutnya, dalam pertarungan yang keras baik di luar atau di dalam, dan juga disinyalir ada keterlibatan rezim Soeharto yang kuat, tampak di hadapan para muktamirin: “Beberapa kiai yang duduk dekat ketua umum PBNU menahan air mata dan berdoa secara khushyuk.”²²

Dalam penuturan lain Greg Barton menyebutkan: “Para kiai tua tak lagi dapat menahan kegundahan mereka dan menangis, sedangkan yang lebih muda mondar-mandir kebingungan. Beberapa

¹⁹ Menurut Greg Fealy, pencalonan Ajengan Ilyas Ruchiyat di Munas Lampung muncul setelah syuriah mengalami deadlock tentang apakah KH. Yusuf Hasyim atau KH. Sahal Mahfudh yang menjadi PJs Rais Aam. Lihat selengkapnya sejarah Ajengan Ilyas Ruchiyat dalam, IIP D Yahya, *Ajengan Cipasung: Biografi KH. Moh Ilyas Ruchiyat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006).

²⁰ ART NU Hasil Muktamar NU ke-29 tahun 1994 di Cipasung, bab “Pemilihan dan penetapan Pengurus”, pasal 35 ayat a-c. Bunyi ART ini tidak berbeda dengan Keputusan Muktamar NU XXIX NO.1/MNU-29/1994 tentang peraturan tata tertib Muktamar, pasal 28 bab VII tentang pemilihan pengurus besar, sebagaimana dalam Lajnah Ta’lif wa Nasyar PBNU, Hasil-hasil Muktamar ke-29 NU (Jakarta: Lajnah Ta’lif wa Nasyr PBNU, 1996).

²¹ Greg Fealy dan Greg Barton (editor), *Tradisionalisme Radikal*, hlm. 220 dan seterusnya dalam artikel Greg Fealy dengan judul “Percikan Api Muktamar NU 1994: Adurrahman Wahid, Suksesi dan Perlawanan NU atas Kontrol Negara”.

²² Greg Fealy dan Greg Barton (editor), *Tradisionalisme Radikal*, hlm. 233.

kiai senior yang paling dekat dengan Gus Dur diam-diam berdoa kepada Allah agar ikut campur tangan dalam hal ini.”²³

Selama penghitungan suara, tiap suara yang memilih Gus Dur dibacakan maka para pendukungnya meneriakkan dukungannya, sebaliknya jika kertas suara untuk Abu Hasan yang dibacakan maka mereka diam. Ketika penghitungan suara selesai pukul 03.00 malam, Gus Dur memperoleh 174 suara dan Abu Hasan 142 suara.

Ketika susunan pengurus PBNU diumumkan pada pertengahan Desember 1994, dan orang-orang Abu Hasan ditaruh di tempat yang tidak strategis, Abu Hasan dengan kelompok yang tidak puas kemudian membentuk apa yang disebut KPPNU pada akhir Desember 1994, dengan memasukkan misalnya KH. Idham Cholid, KH. Ali Yafie, dan KH. Syukron Makmun. Karena tidak memperoleh dukungan dari bawah dan massa NU, KPPNU dalam perjalannya hilang sendiri. Hanya saja, fenomena ini, betul-betul menjadi satu catatan penting, karena dalam sejarah NU kali inilah terjadi dua pembelahan yang berujung pada pendirian organisasi tandingan, meskipun pemilihan itu dilakukan dengan pemilihan.

Saat itu, para pendukung Gus Dur menyebut kemenangan Cipasung adalah kemenangan atas politik uang, intimidasi dan intervensi pemerintah Soeharto. Dari sisi tradisi, Muktamar Cipasung, juga menjadi permulaan dari adanya suatu dimensi dalam muktamar NU, yang oleh Gus Dur diakui: “Sebagai kemenangan terhadap uang dan intimidasi.”²⁴

Sebelumnya memang dikenal, muktamar NU itu didanai sendiri oleh peserta muktamar dan warga NU dengan bantingan berbagai kebutuhan logistik yang diperlukan, dan peserta muktamar memberikan suara berdasarkan keyakinan mereka, bukan karena intimidasi dan uang.

6. Pemilihan Langsung Plus Kontrak Jam'iyah

Pada awalnya KH. Hasyim Muzadi dipilih oleh Muktamar NU ke-31 tahun 1999 di Kediri menggantikan Gus Dur. Sedangkan KH. Sahal Mahfudh dipilih sebagai Rais Aam Syuriah NU. Di Muktamar NU Kediri, pemilihan berjalan sebagaimana model muktamar sebelumnya. Hasil Muktamar Kediri yang menempatkan Kiai Hasyim Muzadi sebagai ketua umum PBNU diterima oleh segenap warga NU saat itu. Tapi hal ini menjadi titik balik ketika kepengurusannya berjalan sampai tahun 2004. Sampai diadakannya Muktamar NU ke-31 di Boyolali, pertarungan faksi-faksi di NU mempengaruhi pola pemilihan kepemimpinan di muktamar ini.

Pemilihan kepemimpinan NU di Muktamar Boyolali berjalan sebagaimana disebutkan dalam ART yang disyahkan pada muktamar ini: Rais Aam dipilih langsung oleh muktamar; Wakil Rais Aam ditunjuk oleh Rais Aam terpilih setelah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang; dan ketua umum dipilih secara langsung oleh muktamar dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rais Aam setelah memperhatikan aspirasi

²³ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, hlm. 237.

²⁴ Greg Fealy dan Greg Barton (editor), *Tradisionalisme Radikal*, hlm. 233.

yang berkembang.”²⁵

Perbedaan pemilihan kepemimpinan NU di Mukhtar Boyolali ini dengan pemilihan sebelumnya (Mukhtar Kediri), terletak pada soal kontrak jam'iyah. Dalam proses pertarungan yang keras di luar arena mukhtar, Rais Aam terpilih merestui KH. Hasyim Muzadi untuk dicalonkan dengan memakai kontrak jam'iyah agar tidak melenceng ketika terpilih sebagai ketua PBNU. Kontrak Jam'iyah itu, yang merupakan juga sejarah pertama dalam organisasi NU adalah kontrak secara formal dari Rais Syuriah terpilih terhadap calon Ketua Tanfidziyah.

KH. Sahal Mahfudh saat itu berjanji begini:

“Saya selaku Rais Aam terpilih PBNU, menyatakan setuju, saudara Hasyim Muzadi untuk dicalonkan menjadi ketua umum tanfidziyah PBNU, dengan syarat yang telah saya tentukan, yaitu membaca dan menandatangani kontrak jam'iyah NU.”

Ditandatangani pada 2 Desember 2007 di arena Mukhtar, Boyolali atas nama Rais Aam terpilih, Kiai Sahal. Dengan janji ini, Kiai Sahal saat itu tidak mengakomodasi kritikan-kritikan yang dialamatkan kepada Kiai Hasyim Muzadi dari kelompok penyelamat Khittah NU, karena publik tetap membaca Kiai Sahal setuju berduet dengan Kiai Hasyim Muzadi.

Kiai Hasyim Muzadi saat itu mengikat

kontrak dengan mengucapkan sumpah:

Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ila ha illallah, wa asyhadu anna muhammadarrasulullah. Yang bertanda tangan di bawah ini: “Saya, Hasyim Muzadi; pekerjaan, pengasuh PP Al-Hikam, Malang; alamat Jl. Jengger Ayam, 25 Malang. Sehubungan pencalonan saya, sebagai ketua tanfidziyah NU (2004-2009), dengan ini saya menyatakan janji, apabila Allah menakdirkan saya terpilih, maka saya: akan taat sepenuhnya kepada AD/ART NU, Rais Aam dan keputusan lembaga syuriah; akan sekuat tenaga melaksanakan amanat Mukhtar XXXI dan keputusan jam'iyah yang lain; tidak akan, langsung atau tidak langsung, mengatasmakan NU kecuali bersama-sama Rais Aam, atau atas dasar keputusan rapat PBNU, dan tidak akan bertindak dan mengambil kebijakan sendiri tanpa konsultasi dengan Rais Aam; tidak akan melakukan kegiatan yang dapat diartikan sebagai kegiatan politik praktis; tidak akan mencalonkan diri untuk jabatan politis, baik di legislatif maupun eksekutif. Demikian pernyataan dan janji saya, *bisyahdatillah* di hadapan Rais Aam terpilih, apabila di belakang hari kemudian saya melanggar, salah satu pernyataan dan janji saya di atas, maka saya akan menerima keputusan apa pun yang diambil Rais Aam. *Wallahu syahidun ala dzalika wahuwa waliyut taufiq.*²⁶

Janji dan sumpah itu diucapkan Kiai

²⁵ ART NU Hasil Mukhtar NU ke-31 di Boyolali, Bab XIII tentang “Pemilihan dan Penetapan Pengurus”. Ketentuan ini sama dengan tata Tertib yang disetujui, yang draft awalnya sudah dibagi-bagi sebelum Mukhtar dimulai. Lihat, Panitia Mukhtar NU ke-31, Draft Materi tata Tertib, Bahsul Masail Diniyah, Program Kerja, dan Tausiyah Mukhtar NU ke-31, dicetak dengan sampul warna hijau muda.

Hasyim Muzadi di Boyolali pada tanggal 2 Desember 2004 dalam detik-detik pencalonan kembali dirinya sebagai ketua umum PBNU. Duet Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Hasyim Muzadi kembali terpilih secara langsung oleh muktamirin.

Hasyim terpilih di tengah pertarungan dan kritik-kritik dari luar arena yang dilakukan para penggagas Mubes Warga NU di Cirebon secara keras.

Koran-koran pada saat dilangsungkannya muktamar juga memberitakan betapa para pengurus NU yang datang ke arena muktamar sudah menggunakan mobil-mobil mengkilap secara mencolok, pemandangan yang belum tampak mencolok pada Muktamar-muktamar sebelumnya.

Melihat Konteks Sosial-Politik Perbedaan Pemilihan Kepemimpinan PBNU

Di bagian ini akan dibaca perbedaan soal pemilihan kepemimpinan NU sebagaimana disebutkan di atas, dengan membaca konteks sosial dan politik untuk memberikan gambaran bahwa perbedaan pemilihan itu tidak serta merta ada secara tiba-tiba. Terjadinya perbedaan itu juga dipicu oleh kondisi sosial dan politik saat itu, dan model pemilihan itu digunakan sebagai diagnosa untuk memecahkan persoalan yang dianggap muncul.

Dari beberapa narasi di atas, di sini hanya akan disebutkan 3 cara pemilihan, yaitu: pemilihan terbatas lewat musyawarah tahun 1926, pemilihan oleh *ahlul*

challi wal aqdi tahun 1984, dan pemilihan langsung plus kontrak jam'iyah.

1. Pemilihan dalam Musyawarah Terbatas di Surabaya

Pemilihan dengan musyawarah oleh rapat kecil tahun 1926, dipengaruhi oleh konteks sosial saat itu. Secara sosial keagamaan, saat itu terjadi perdebatan dan diskusi di kalangan muslim Indonesia tentang gerakan Wahabi, yang salah satunya mempengaruhi gerakan-gerakan yang menamakan diri gerakan moderen dalam Islam. Wahabi pada tahun 1925 sudah mampu meratakan Hijaz, meskipun baru tahun 1932 kerajaan Arab Saudi diproklamasikan.²⁷

Di level lokal, terjadi perdebatan-perdebatan kalangan yang mengaku diri pembaharu terhadap praktik-praktik keagamaan madzhab, lokal dan populer. Saat yang sama wilayah Nusantara masih dijajah Belanda, sehingga membutuhkan persatuan antara semua kelompok.

Menyatukan ulama ke dalam satu wadah saat itu masih sulit, di tengah perdebatan-perdebatan keagamaan yang panas, munculnya Wahabi di Arab Saudi dan keharusan umat Islam perlu bersatu menghadapi penjajahan Belanda, serta ekonomi rakyat yang memburuk. Para ulama masih menunggu, membaca, dan melihat situasi, dan kadang-kadang melibatkan diri dalam perdebatan. Usaha yang dilakukan kelompok-kelompok ulama yang melakukan rapat di Surabaya, de-

²⁶ Kontrak jam'iyah ini dikutip dari web www.nukhittah26.wordpress.com, dengan judul tulisan "Mengingat kembali "Persetujuan Mbah Sahal dan Pernyataan H. Hasyim Muzadi (ghairu Asy'ari)".

²⁷ Tentang sejarah Wahabi bisa dilihat dalam, Albert Hourani, *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim* (Bandung: Mizan, 2004), khusus yang membicarakan Arab Saudi; Robert Lacey, *Kerajaan Petrodollar Saudia Arabia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986); Syaikh Zaini Dakhlani, *Fitnatu al-Wahhabiyah*, dalam www.sunna.info, dan lain-lain. Penulis sendiri telah menulis naskah yang segera terbit tentang Gerakan Wahabi dalam tiga jilid.

ngan maksud mengirim utusan Komite Hijaz dan sekaligus membuat organisasi NU, dilakukan dalam keadaan terbatas. Yakni belum dihadiri oleh ulama-ulama seluruh pesantren atau sebagian besar pesantren di Nusantara, meskipun yang hadir merupakan syekh-syekh yang dihormati.

Pengaruh tradisi musyawarah yang melanda desa-desa di Nusantara tampaknya dipakai oleh ulama-ulama yang rapat di Surabaya, di samping tradisi musyawarah bisa dicari rujukannya dalam tradisi Islam. Persentuhan kalangan ulama pesantren dengan tradisi pilihan langsung melalui suara terbanyak, atau tradisi demokrasi dari Barat belum cukup kuat. Sangat logis kemudian pemilihan kepemimpinan dilakukan dengan musyawarah di rapat kecil yang diadakan di Surabaya itu.

2. Pemilihan Melalui

Ahlul Halli wal Aqdi

Konteks sosial dan politik dilakukannya pemilihan pemimpin NU oleh *ahlul halli wal aqdi* pada Mukhtamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, benar-benar ada dalam situasi yang sangat rumit dan pertarungan yang keras. Saat itu rezim Soeharto menginginkan agar semua ormas memakai asas Pancasila, yang kemudian menimbulkan pergolakan hampir di semua ormas, bahkan partai politik sekalipun. Yang mengalami perpecahan untuk merespon ini salah satunya adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang terpecah menjadi dua kelompok: MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) dan Insan Cita. Saat itu juga baru saja terjadi peristiwa Tanjung Priok yang diangkat oleh sebagian umat Islam sebagai sebuah kegetiran, karena banyak umat Islam yang terbunuh oleh mesin militer.



Di tengah situasi politik seperti itu, terjadi arus balik perlawanan faksi-faksi di NU yang tidak suka terhadap KH. Idham Cholid yang sangat menghegemoni, baik karena terlalu lama memimpin maupun karena soal penyingkiran kelompok NU di PPP.

Kiai Idham yang memimpin NU saat itu, dianggap sangat bertanggungjawab atas kekalahan unsur NU di PPP. Saat itu memang NU masuk menjadi unsur PPP, dan lewat penyingkiran Jaelani Naro terhadap kelompok NU, maka calon-calon dari NU yang akan dipertarungkan di Pemilu 1982 sangat sedikit dan ada di nomor urut kecil, membuat semakin jelas dan pentingnya NU digagas untuk kembali ke khittah, agar secara organisasi menjadi maslahat, dan tidak mengalami pembasmian oleh Soeharto secara politik.

Upaya pemisahan dengan PPP tidak disukai kelompok politik NU yang salah satunya berada di bawah payung Kiai Idham Cholid, mantan pendukung berat Soekarno yang kemudian beradaptasi dengan rezim Soeharto dan masuk ke PPP.

Kelompok yang melihat pemisahan NU dari PPP, dan bahkan dari partai politik, di bawah naungan kiai-kiai senior yang dikenal dengan kelompok Situbondo, merujuk tempat kediaman Kiai As'ad Syamsul Arifin di Situbondo, kemudian meminta Kiai Idham Cholid untuk mengundurkan diri dari jabatannya di PBNU.²⁸

Drama permintaan pengunduran diri Kiai Idham Cholid oleh beberapa kiai senior NU saat itu, menandai pertarungan yang sangat keras sekaligus genting. Rentetan dari pertarungan ini adalah digelarnya Munas Alim Ulama tanggal 18-21 Desember 1983 untuk memperkokoh diselenggarakannya muktamar di Situbondo tahun 1984. Pemilihan pemimpin NU lewat *ahlul halli wa al-aqdi* saat itu, digunakan untuk memuluskan jalan kembali ke Khittah NU, agar yang dipilih bisa menjadi pelaksana, pengendali dan pengarah jalannya khittah NU yang dirumuskan tahun 1984. Pemilihan model ini ditempuh, untuk mengantisipasi pendukung Kiai Idham Cholid yang memang masih kuat, di samping fenomena politik yang mengharuskan NU mengakui Pancasila sebagai asas dan Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai bentuk final, meminjam istilah KH. Achmad Sidik.

Meski ada dalam pertarungan yang keras, akhirnya pemilihan model *ahlul halli wal aqdi* diterima, karena model ini juga pernah dilakukan dalam tradisi Islam di masa sahabat. Peserta muktamar juga

menerima model itu. Kiai Idham Cholid memberikan surat dukungan atas cara aklamasi oleh hasil *ahlul halli wal aqdi*, dengan tetap mempertimbangkan orang-orangnya agar dimasukkan di kepengurusan. Meskipun dalam pembacaan pengumuman di hadapan muktamirin, Gus Dur terbelalak karena nyaris orang-orang KH. Idham Cholid diafikirkan.

3. Pilihan Langsung Plus Kontrak Jam'iyah dan Kelanjutannya

Konteks sosial dan politik yang mempengaruhi ditempuhnya cara pilihan langsung plus kontrak jam'iyah, dimulai pada tahun 2004. Latar belakang model pemilihan macam ini adalah, Kiai Hasyim Muzadi mencalonkan diri sebagai wapres bergandengan dengan Megawati yang ternyata mengalami kekalahan. Diikuti beberapa pengurus PBNU untuk menjadi tim sukses pemenang pasangan Capres/Cawapres, dunia Nahdliyin menjadi bergejolak hebat.²⁹

Warga NU yang tidak puas dengan kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi, menyelenggarakan Mubes warga NU di Babakan Ciwaringin. Mubes warga NU adalah protes atas kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi yang dinilai membelokkan arah NU, menjadi terjun ke politik praktis dan memerankan PBNU seperti partai politik. Kiai Hasyim Muzadi oleh Komite Penyelamat Khittah NU yang salah satunya menjadi cikap bakal Mubes Warga NU,

²⁸ Lihat desakan pengunduran diri terhadap KH. Idham Cholid ini dalam, Greg Fealy dan Greg Barton (editor), *Tradisionalisme Radikal*, hlm. 84, bagian tulisan Mitsuo Nakamura tentang *Tradisionalisme Radikal Catatan Muktamar Semarang 1979*.

²⁹ Buku yang telah mendokumentasikan situasi ini bisa dibaca dalam, Ahmad Nurhasyim dan Nur Khalik Ridwan, *Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan* (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004).

dianggap telah meremas-remas Khittah NU.

Musyawarah Besar Warga NU diselenggarakan tanggal 8-10 Oktober sebelum Mukhtamar NU di Boyolali, yang diselenggarakan pada 28 November sampai 2 Desember 2004.³⁰ Dengan sendirinya mukhtamar di Boyolali itu, menjadi pertarungan yang keras di antara berbagai faksi, termasuk dengan Gus Dur yang saat itu sudah menjadi ketua Dewan Syuro PKB tetapi tidak setuju dengan langkah-langkah Kiai Hasyim Muzadi. Tapi cawacawanya Gus Dur juga menjadi krusial sendiri, karena ia sudah terjun di politik praktis.

Di tengah pertarungan yang keras itu, Kiai Sahal Mahfudh yang dipilih sebagai Rais Aam, tetap merestui Kiai Hasyim Muzadi untuk dicalonkan dan dipilih para mukhtamirin. Kiai Sahal Mahfudh tidak begitu menghiraukan suara-suara yang disuarakan oleh Mubes Warga NU, meskipun mendengarkan perlunya meluruskan ketua terpilih agar tidak mengulang kasus serupa, dengan membuat kontrak jam'iyah yang harus dibaca KH. Hasyim Muzadi saat pencalonan.

Terpilihnya Kiai Hasyim Muzadi ditanggapi oleh kelompok kiai-kiai sepuh saat itu sebagai suatu masalah. Mereka memberi mandat kepada Gus Dur untuk

membentuk keemimpinan NU yang ditandatangani di Solo, 1 Desember 2004. Isi mandat itu di antaranya:

*"Ijtima'iyah yang mewadahi para kiai untuk melestarikan dan memperjuangkan faham Ahlusunnah wal Jamaah dan muamalah diniyah tidak untuk mencari kedudukan apalagi untuk mencari kekayaan. Melihat perjalanan jam'iyah NU akhir-akhir ini telah menyimpang dari tujuan utama didirikannya, terlebih-lebih kejadian di Mukhtamar NU ke-31 di Solo yang tidak mencerminkan akhlakul karimah..."*³¹

Dalam perjalanannya, mandat kiai-kiai sepuh tidak jadi diwujudkan dalam bentuk organisasi NU, bahasa mereka disebut sebagai "NU yang benar", dengan mempertimbangkan keutuhan jam'iyah, dan karenanya gerakan ini lebih sebagai gerakan kultural. Kepemimpinan NU tetap dipegang oleh Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Hasyim Muzadi. Di tengah perjalanan barulah Kiai Sahal Mahfudh yang dulu tidak mau menerima suara-suara dari Komite Penyelamat Khittah NU, akhirnya merasakan sendiri problem kepemimpinan tanfidziyah di bawah Kiai Hasyim Muzadi.

Salah satunya, kasus terpilihnya M.

³⁰ Hasil dari Mubes Warga NU ini didokumentasikan oleh Komite Penyelamat Khittah NU, Hasil-Hasil Mubes Warga NU di Babakan Ciwaringin Cirebon, (Yogyakarta: Komite Penyelamat Khittah NU, 2004).

³¹ "Kepada Yang Terhormat KH. Abdurrahman Wahid", surat dari kiai-kiai sepuh kepada KH. Abdurrahman Wahid dengan menggunakan huruf Arab pegon, ditandatangani 31 kiai sepuh yang saat itu mencermati Mukhtamar ke-31, yaitu: KH. Abdullah Faqih, KH. Shonhaji, KH. Turmuzdi Badrudin, KH. Hamdan Kholid, KH. Muhaiminan, KH. Sanusi Baco, KH. Akram Malibari, KH. Abdurrahman Khudori, KH. Masbuhin, KH. Kholilurrahman, KH. Abdullah Abbas, KH. Anwar Iskandar, dan lain-lain. Liku-liku kelompok ini pasca Mukhtamar dan beberapa kali pertemuannya bisa dilihat dalam, Anonim, *Dari Para Ulama Menuju NU* (Jakarta: tnp., 2004).

Adnan tampak dengan jelas bagaimana pemimpin syuriah ini marah atas Kiai Hasyim Muzadi yang. Kiai Sahal menganggap Kiai Hasyim berperan dalam terpilihnya M. Adnan sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah.

Kiai Sahal, diberitakan media massa saat itu, mengemukakan dengan judul miris: *Mbah Sahal Tolak Masuk PWNU, Minta Klarifikasi Money Politics*. Kiai Sahal mengemukakan secara tegas menolak namanya dicantumkan sebagai mustasyar dalam susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng periode 2008-2013.

“Ya tetapi mau diapakan lagi wong pengurus cabangnya sudah seperti itu. Tidak ada lagi idealisme di NU, pikirannya pragmatis, kepentingan sesaat dan yang pasti berkaitan syahwat politik.”³²

Titik bidikan Kiai Sahal saat itu sebenarnya adalah Kiai Hasyim Muzadi. Sebab, yang memimpin sidang saat itu Kiai Hasyim Muzadi. Pantas saja bila dianggap banyak berpengaruh di Konferwil Jateng, meskipun hal ini ditolak panitia Konferwil saat itu.

Kasus-kasus lain, seperti Pilkada di Jatim juga mempengaruhi perubahan persepsi Kiai Sahal Mahfudh terhadap Kiai Hasyim Muzadi, yang saat itu dikenal dekat dengan salah satu calon Pilkada Jatim. Dalam hal ini, bagi Kiai Sahal Mahfudh untuk berani menyatakan ketidaksetujuannya dengan Kiai Hasyim Muzadi, ternyata butuh waktu bertahun-tahun

meskipun Komite Penyelamat Khittah NU yang salah satunya ikut melahirkan Mubes Warga NU di Babakan Ciwaringin telah memberikan kritik secara jelas terhadap kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi memang begitulah proses yang berjalan di dalam organisasi NU.

Kritik-kritik itu baru dirasakan benar setelah kritik-kritik itu berjalan beberapa tahun. Hal ini tampak sekali dalam wawancara dengan majalah *Tempo*, sampai-sampai Kiai Sahal Mahfudh menyampaikan sesuatu pernyataan yang sebenarnya mewakili banyak persoalan, mulai dari kasus Konferwil NU Jateng, Pilkada Jatim, dan banyak lagi, dengan menyebutkan begini:

“Hasyim itu kan Ketua PNU, Partai Nahdlatul Ulama. Karena hasrat politiknya begitu tinggi, saya sendiri enggak cocok dan enggak sanggup lagi kalau harus bersama dia. Berkali-kali sudah saya ingatkan, tapi tidak digubris. Syuriah memang tidak bisa memecat tanfidziyah. Tidak ada mekanismenya. Akibatnya, sekarang malah banyak pengurus NU di daerah menjadi calon bupati atau wakil bupati. Kalau nanti masa jabatan saya habis, saya enggak mau dipilih lagi. Kalau masih diminta organisasi, saya tidak mau bareng Hasyim lagi.”³³

Dalam kasus pilihan langsung plus kontrak jami'iyah, tampaknya dilihat secara praktik, kontrak jam'iyah itu tidak bertaji dengan melihat kemarahan dan kekusarahan

³² *Suara Merdeka*, 17 Juli 2008 dalam judul berita “Mbah Sahal: Tolak Masuk PWNU, Minta Klarifikasi Money Politics”.

³³ Wawancara KH. Sahal Mahfudh dengan *Majalah Tempo*, edisi 25 September - 5 Oktober 2008, dengan judul asli “KH. Sahal Mahfudh: Kita Majemuk, Kaya Budaya dan Tradisi.”

Kiai Sahal Mahfudh atas Kiai Hasyim Muzadi sebagaimana dinyatakan di atas. Keluhan Kiai Sahal Mahfudh yang mengatakan, syuriah memang tidak bisa memecat tanfidziyah, adalah pernyataan jujur, sekaligus menunjukkan bahwa Kiai Sahal Mahfudh butuh bertahun-tahun untuk menemukan dan memahami kritik dari kelompok-kelompok yang selama ini telah melakukan kritik tajam. Sekarang, tatkala para pengkritik sudah membiarkan saja karena sudah sulit direm, justru Kiai Sahal Mahfudh menyuarakannya. Meski kritik Kiai Sahal Mahfudh itu terlambat dan penting, tapi tetap saja kritik itu menunjukkan adanya hal jelas, di mana pilihan langsung dengan kontrak jam'iyah pun belum cukup bisa digunakan untuk menjadi legitimasi mengarahkan NU agar sesuai dengan khittah NU.

Refleksi untuk Muktamam-Muktamam Selanjutnya

Tradisi pemilihan langsung terhadap kepemimpinan NU, sebenarnya menjadi pola yang baik. Sebab, ia menjadi model aspirasi peserta muktamir terhadap gambaran para pemimpin NU ke depan. Pemilihan oleh sekelompok orang di format, seperti *ahlul halli wal aqdi* meskipun memiliki rujukan juga dalam tradisi Islam, bagaimanapun juga lebih elitis. Tapi, kadang-kadang, seperti kasus Muktamam di Situbondo, pemilihan semacam itu dibutuhkan.

Hanya saja, untuk suatu yang ideal, pemilihan langsung yang sudah dilakukan sejak memilih KH. Noor menggantikan Hasan Gipo, lalu digantikan KH. Mahfudh Sidik, dan seterusnya, sebenarnya lebih mencerminkan suara dan aspirasi mukta-



mirin, karena para peserta muktamam bisa bebas melakukan pilihannya dalam pemilihan. Muktamir bisa berdaulat dan memiliki fungsinya untuk datang di muktamam.

Hanya saja, tradisi pemilihan langsung di dalam NU, hasilnya selalu diwarnai oleh fenomena laten dua hal. *Pertama*, pemilihan langsung yang menghasilkan seorang pemimpin yang bertahan begitu lama yang menimbulkan kompleksitas masalah. *Kedua*, dan adanya dualisme dalam praktik antara tanfidziyah dan syuriah.

Di luar dua masalah itu, sebenarnya masih ada satu hal lagi, yaitu pilihan langsung itu selalu dan akan mungkin terancam bila dilakukan praktik *money politics* dalam proses pemilihan, meskipun yang memilih adalah para kiai dan guru-guru tarekat sekalipun.

Pertama, Kiai Idham Cholid (di samping Kiai Wahab Chasbullah yang meninggal di saat kepengurusannya

belum habis), mewakili kepemimpinan NU yang sangat lama memimpin, meskipun dihasilkan oleh tradisi pemilihan langsung. Kepemimpinan yang terlalu lama bertahan berperiode-periode melebihi 2 periode, sebaik apa pun, dia akan menghambat regenerasi. Terlalu lama memimpin, juga akan menimbulkan suatu kehilangan daya kritik internal dalam organisasi. Dan seterhormat apa pun, seseorang, kalau ia memimpin terlalu lama, juga akan mengalami kejatuhan yang sangat sakit. Dengan sendirinya, kepemimpinan yang terlalu lama melebihi dua periode, justru akan menjadi masa di mana kepemimpinan itu akan mengalami terjun ke bawah, disadari atau tidak. Kompleksitas masalah, faksi-faksi dan warga NU yang jenuh, berpadu dengan generasi baru yang tumbuh, akan selalu tidak memperhitungkan seberapa besar jasa pemimpin itu di masa lalu.

Kedua, dualisme kepemimpinan tanfidziyah dan syuriah sebenarnya tidak perlu terjadi, tetapi faktanya sering terjadi. Salah satu contoh terakhir dan kongkrit adalah keluhan Kiai Sahal Mahfudh kepada Kiai Hasyim. Pernyataan Kiai Sahal Mahfudh itu justru menunjukkan dengan jelas adanya dualisme kepemimpinan yang muncul, karena masing-masing mendapat legitimasi dari muktamar, dipilih langsung, meskipun tanfidziyah dalam proses pencalonannya harus

mendapat restu terlebih dulu dari syuriah terpilih. Wewenang tanfidziyah yang sekadar melaksanakan arahan dan garis dari syuriah menjadi tidak bermakna.

Sebenarnya, di tangan syuriah yang kuat, dan berani mengambil tindakan-tindakan tertentu seperti pernah diperankan Kiai Wahab Chasbullah,³⁴ maka dualisme tidak akan terjadi, meskipun waktu yang begitu lama ketika Mbah Wahab memimpin menimbulkan kompleksitas di NU sendiri. Sementara di tangan syuriah yang lemah dan tidak berani mengambil tindakan-tindakan tertentu terhadap arah dan rel organisasi, dualisme akan selalu muncul di mana tanfidziyah akan menguat. Dualisme seperti ini, akan merusak keutuhan dan arah organisasi, sementara syuriah tidak bisa memecat tanfidziyah: masing-masing disandra oleh legitimasi pilihan langsung.

Untuk refleksi ke depan, dualisme yang bukan hanya terjadi pada zamannya Kiai Sahal Mahfudh itu, juga perlu dipertimbangkan sebagai salah satu masalah laten yang tidak kunjung jelas. Yang dipilih langsung sebaiknya hanya pemimpin tertinggi NU, sementara pelaksana sebaiknya dipilih oleh syuriah setelah mempertimbangkan aspirasi muktamar. Syuriah harus bisa memecat tanfidziyah kalau dianggap melenceng dari arah dan visi organisasi, meskipun tentu syaratnya harus benar-benar ketat. Tetapi

³⁴ KH. Saifudin Zuhri mengakui kuatnya Rais Aam yang dipegang KH. Wahab Chasbullah dengan mengatakan demikian: "Dalam sejarahnya, hampir 1/2 abad ini, kedudukan serta peranan Rais Aam sangatlah besar dan hampir-hampir menentukan. Hampir tidak pernah terjadi bahwa pendapat Rais Aam dianulir (diurungkan, dibatalkan oleh syuriah). Pengalaman menunjukkan bahwa pendapat Rais Aam selalu mendapat dukungan atau backing dari seluruh syuriah..." Lihat dalam, KH. Saifudin Zuhri, *Kyai Haji Abdul Wahab Chasbullah Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Pustaka Falaakhiyah, 1983), hlm. 82.



syuriyah sendiri juga harus bisa dijatuhkan, yaitu oleh muktamar luar biasa untuk mengurangi hak absolut, dengan sarat-sarat yang juga harus ketat.

Dengan sendirinya, pertarungan tentang imajinasi NU ke depan, hanya berfokus pada satu hal: posisi pemimpin tertinggi, yaitu posisi sebagai Rais Aam Syuriyah. Selama ini, posisi Rais Aam justru dalam praktik tidak tampak sebagai pemimpin tertinggi NU, karena seringkali muncul dualisme di mana tanfidziyah sangat kuat dengan legitimasi dipilih muktamirin. Apalagi bagi orang luar tampak bahwa yang menjadi pemimpin itu ketua umum PBNU, yang itu berarti ketua tanfidziyah, sering sekali mengecoh publik.

Ketiga, NU didirikan oleh para ulama yang *notabene* mengikuti tradisi kesufian yang sering mengajarkan keikhlasan. Perkembangan organisasi yang dalam beberapa kali muktamar disinggung-singgung telah mulai bergesernya ruh keikhlasan, kemandirian dalam menyelenggarakan muktamar, perlu ada keberanian dari peserta muktamar untuk tidak melihat dan hadir di muktamar de-

ngan logika “semua terima beres” dari mulai akomodasi berangkat sampai pulang. Cabang-cabang dan wilayah yang mengirimkan wakilnya harus memiliki tanggungjawab untuk menyokong logistik keberangkatan wakil-wakil mereka, agar tidak mudah dibeli. Ini perlu dilakukan agar NU tidak menjadi muktamar partai politik, yang serba gelap terhadap biaya dan akomodasi peserta muktamar.

Kalau begitu memang semakin jauhlah kata KH. Munasir di awal tulisan ini, susah ditemukan dalam kenyataan. Dan, pantaslah kalau disebut Kiai Sahal Mahfudh bahwa NU=PNU (Partai Nahdlatul Ulama), sebagai parodi dengan terang benderang.

Kalau pemimpin tertinggi yang disebut syuriyah saja mengeluh sarannya tidak digubris, tidak bertaji, dan tidak didengarkan sebagaimana dikemukakan KH. Sahal Mahfudh di atas, pertanyaannya: “Apakah ini tidak berarti masalahnya memang sudah melebihi dosis kewajaran?” ***